PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 23 Palembang Telp. (0711) 356018 - 321181 Fax. (0711) 314586 - 356118
Website : www.bappeda.sumselprov.go.id E-mail : info@bappeda.sumselprov.go.id

NOTULEN

Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan

Hari/Tanggal : Jumat / 25 Juli 2025

Waktu : 13.00 s.d selesai

Pimpinan Rapat :

1. H. Nopianto, S.Sos., MM (Koordinator)
2. Ir. H. Hendra Gunawan, SH., MM (Ketua)
3. Ir. H. Muhammad F. Ridho, ST., MT (Wakil Ketua)
4. H. David Hadrianto Aljufri, SH., MH (Anggota)
5. M. Yansuri, S.IP (Anggota)
6. M. Al Amin, S.Si (Anggota)
7. Alwis Gani, SE., MM (Anggota)
8. Sri Mulyadi, SE., M.Si (Anggota)
9. Abdullah Taufik, SE., MM (Anggota)
10. H. Alfrenzi Panggarbesi., S.Si (Anggota)
11. Ayu Nur Suri, SE., MM (Anggota)
12. Ir. H. Zulkifli Kadir (Anggota)
13. Ismail Hairul Pala., SE (Anggota)
14. Elvaria Novianti, SE (Anggota)
15. Muhammad Candra, SH (Anggota)
16. H. M. Anwal Al Syadat, S.Si., M.Si (Anggota)
17. Imam Mustakim, ST., MT (Anggota)
18. H. Toyeb Rakembang, S.Ag (Anggota)

Peserta :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel
3. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel
4. Sekretaris BPKAD Provinsi Sumsel
5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel
6. Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumsel
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumsel

9. Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
10. Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
11. Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel
12. Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
13. Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Provinsi Sumsel
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel
15. Instansi Vertikal

Tempat : Ruang Rapat Aula LT.3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan

I. Pembukaan : Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Pansus 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ir. H. Hendra Gunawan, SH., MM (Ketua), Menyampaikan bahwa :

1. Tema rapat Pansus adalah Bidang Ekonomi dengan 10 OPD.
2. Permasalahan perekonomian di sektor pertanian Sumsel adalah belum mampu hilirisasi, sehingga diperlukan terobosan agar produk-produk dan SDA yang belum dapat memberikan nilai tambah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dikarenakan masyarakat Sumsel banyak bergerak di sektor pertanian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
3. Apa yg perlu digali dari sektor perkebunan karena sawit Sumsel yang luas.
4. Sektor pertanian juga perlu meningkatkan pendapatan asli daerah.
5. Bagaimana meningkatkan PAD secara signifikan melalui hilirisasi sektor pertanian dalam arti luas.
6. Agar Dikoreksi kembali pada Bab IV, di upgrade isi nya terutama pada data tabel-tabel.

II. Pembahasan : **Paparan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Ibu Regina Ariyanti, ST :**

1. Pertumbuhan ekonomi Sumsel cenderung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi Sumatera Selatan terhadap PDRB di Pulau Sumatera sebesar 13,63% dan pertumbuhan ekonomi Sumsel tahun 2024 mencapai 5,03%, tertinggi di Pulau Sumatera bersama dengan Sumut
2. 5 Sektor share PDRB lapangan usaha tahun 2024 terbesar ada di sektor, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi. Jika dilihat dari sisi pengeluaran maka distribusi konsumsi rumah tangga tertinggi di tahun 2024 dan dari sisi pertumbuhannya impor luar negeri tertinggi di

tahun 2024. Untuk pertumbuhan tertingi dikab/kota di tahun 2024 ada di Muara Enim, Banyuasin dan OKI

3. Skenario pertumbuhan ekonomi Sumsel 2020 s.d. 2025 bahwa Sumsel pernah mencapai 6,83% pada saat SEA GAMES dan 6,01% pada saat ASIAN GAMES. Saat ini pertumbuhan ekonomi Sumsel adalah sebesar 5,2%.
4. Pada tahun 2029, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 8%. Menurut data, Sumsel pernah mencapai pertumbuhan tertinggi di tahun 2012 yaitu sebesar 6,36. Dan pada tahun 2024, berada di 5,03. Oleh karena itu Sumatera Selatan pada tahu 2025-2029 harus memiliki strategi:
    - Konsumsi dijaga di 5-6%
    - Investasi tumbuh kisaran 10%
    - Ekspor tumbuh di kisaran 9%

    Dengan key sektor: Manufaktur (hilirisasi), Jasa, Pariwisata, Konstruksi/Perumahan, Ekonomi Digital, Semikonduktor, Ekonomi Hijau
5. Perekonomian Sumsel masih ditopang dari sektor pertambangan dan migas, selain itu juga ada beberapa produk pertanian seperti kelapa sawit, kopi, beras dan karet. Harga minyak kelapa sawit dunia diproyeksikan masih akan mengkilap di Tahun 2025, harga diprediksi menguat di kuartal pertama. Untuk harga kopi diperkirakan naik 25% pada Tahun 2025 karena kenaikan harga kopi sejalan dengan kelangkaan pasokan dari produsen utama serta adanya kekuatan pasar global dan perubahan pola cuaca.
6. Capaian sektor perekonomian Sumsel yaitu peningkatan produksi padi, produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Nilai tikar petani secara umum meningkat, nilai tukar petani 128,53. Nilai tukar nelayan Tahun 2024 mencapai 117,43 dan NTPi sebesar 94,84. Peningkatan produksi karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa serta indeks ketahan pangan meningkat dari 2022 ke 2024 . Prevalensi ketidakcukupan pangan terus menurun. Luas tutupan lahan meningkat, PNBP meningkat, jumlah unit perhutanan sosial meningkat. Rasio kewirausahaan daerah 2,51%, , ekspor barang dan jasa (PDRB%) Tahun 2024 adalah 16,84%. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara terus meningkat. Rasio PDRB industri pengolahan dan persentase PMTB terus meningkat.
7. Permasalahan pembangunan Sumatera Selatan di sektor perekonomian yaitu pengembangan potensi ekonomi daerah belum optimal, kerentanan ketahanan pangan dan transformasi ekonomi belum optimal.
8. Isu stretegis sektor ekonomi Sumsel yaitu belum optimalnya produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditi unggulan serta peningkatan daya saing dan realisasi investasi.

9. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan peningkatan ekonomi ada di misi-2, misi-3, misi-5 dan misi-7
    a. Misi ke 2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadlian untuk meningkatkan pendapatan masyarkaat
    b. Misi ke 3: Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kelautan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
    c. Misi 5: Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan kemiskinan
    d. Misi 7: Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarkat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal
10. 12 Program Strategis HDCU yang termasuk di sektor ekonomi yaitu 100.000 Sultan Muda Sumsel; Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya; Sumsel Wonderfull 2023, Revitalisasi Pasar Tradisional. Program-program tersebut berada di Misi 2, 3, 5 dan 7.
11. Target indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030, pertumbuhan ekonomi Sumsel adalah sebesar 8,1% di Tahun 2023. Sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, 9 (Sembilan) Langkah konkrit meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu : percepatan realisasi APBD (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial dan pendapatan retribusi), percepatan realisasi PMA dan PMDN, percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, tingkatkan produktivitas pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan sesuai potensi lokal, tingkatkan output industry manufaktur sesuai potensi lokal serta mempermudah perizinan berusaha.

Diskusi :

1. Dinas Kehutanan Prov. Sumsel

- PNBP dari pinjam pakai kawasan hutan seluas 37.000 hektar untuk pertambangan, listrik dll setiap tahun mendapat PNBP 140 M yang masuk ke rekening Kementerian Keuangan, dan hasilnya belum dibagi ke daerah. Jadi perlu adanya turunan UU No 20 Tahun 1997 yang digantikan dengan UU No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak agar hasilnya dapat dibagikan ke daerah

- Potensi PAD sektor Kehutanan di Kab. OKI yaitu terdapat 7 (tujuh) perusahaan sektor kehutanan yaitu PT. SBA PT. BHLdll yang termasuk dalam Group Sinar Mas.
- Ada beberapa investasi PMDN dan PMDA yang masuk di tahun 2023 dan 2024, sehingga ada potensi besar disini namun akses nya masih sulit

2. Dinas Kelautanan dan Perikanan Prov. Sumsel

- Dislutkan terlah membuat Perda No. 2 Tahun 2020 sdh diintegrasikan dengan RTRW yaitu tentang RZPPPK. Pengelolaan laut dibawah 12 mil adalah kewengan Provinsi trus di Undang Cipta Kerja menjadi kewenang pusat. PP No. 85 Tahun 2021, izin pemanfaatan ruang laut menjadi kewenangan pusat. Saat ini seluruh Kepala Dinas Kelautan Se Indonesia membuat kesepakatan untuk . Otonomi sektor kelautan saat ini "0. PNBP izin pemanfaatan ruang bawah laut sebesar 40 M semuanya masuk ke Kementerian Keuangan dan tidak ada dibagikan ke Pemerintah Provinsi.
- Perlu laboratorium untuk produksi pakan ikan yang berkualitas. Untuk memproduksi pakan ikan, bahan bakunya hanya tersedia di Kab. OKI dan Banyuasin.

3. Dinas Perkebunan Prov. Sumsel

- Ada restribusi dan regulasi dari Sektor Perkebunan. Dbh Sawit Tahun 2024 45 M dan Tahun 2025 35 M
- Dinas Perkebunan untuk menginventarisir perusahaan perkebunan sawit yang berizin dan beroperasi di Sumatera Selatan sebagai sumber PAD karena perusahaan tersebut menggunakan sumber daya alam sehingga tanah menjadi kritis serta rusaknya jalan.
- Untuk mengevaluasi Dana Bagi Hasil Sawit, apakah anggarannya sesuai.
- Dinas Perkebunan untuk menyampaikan data perkebunan sawit di Sumatera Selatan. Potensi PAD dari Perkebunan Sawit ini agar ditingkatkan dengan membangun pabrik CPO.
- Bagaimana 5 tahun ke depan APBD kita naik menjadi 5 T. Sehingga perlu upaya untuk menggali potensi PAD untuk kesejahteraan masyarakat.
- Berapa Luas Sawit di Sumsel (sawit perusahaan dan sawit rakyat), sawit salah satu pendukung sektor perekonomian di Sumsel. Data ini untuk menyesuaikan dengan DBH Sawit yang diterima Sumsel.
- DBh Sawit baru diterima Tahun 2023, pelaksanaan penggunaan anggarannya Tahun 2024 dan Tahun 2025. Anggarannya top down dari pusat dan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

4. Dinas Penanaman Modal Prov. Sumsel

- Untuk membuat regulasi mendukung kemudahan investasi dalam hilirisasi, pertambangan dll untuk meningkatkan PAD.
- Perjanjian Operasional Palembang Square akan berakhir 2026 sehingga semua aset akan menjadi milik pemerintah provinsi, sehingga bagaimana asset tersebut untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Selatan.
- Mengoptimalkan pendapatan di Sumatera Selatan sehingga tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan namun harus menggali potensi-potensi lain dan harus ada kreativitas dalam meningkatkan iklim investasi di Sumatera Selatan

5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel

- Produktivitas padi 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, produktivitas jagung, cabai merah, menurunnya produktivitas disebabkan karena pengaruh alam/musim.
- Dinas Pertanian TPH masuk dalam 77 program strategis Presiden Prabowo dan Gibran (PSN).
- Dalam RPJMD pengembangan food estate di Sumsel, menambah luas sawah, sumsel target 48.000 sudah selesai 28.000. APBN masuk sumsel untuk meningkatkan indeks pertanaman dan belum meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan produktivitas dari APBD berupa bantuan pupuk yang sudah dilakukan tapi belum optimal karena keterbatasan anggaran.
- Sumsel tidak memiliki RMU dan *Dryer*, ada juga Kerjasama dengan pihak ketiga. Sumsel harus memiliki RMU dan *Driyer*, ini dapat menekan daya angkut petani, karena setelah lebih dari 3 hari gabah petani akan rusak. Jika tidak ada RMU dan *Driyer*, Sumsel tidak mendukung proyek strategis nasional. PAD harusnya kita dapatkan tetapi tidak didukung pemerintah maka hasil pertanian Sumsel ke luar.
- Pendapatan sektor pertanian masih kecil sehingga perlu ditingkatkan.
- Perlu melakukan revitalisasi irigasi di Kab. Musi Rawas
- Proyeksi indikator peningkatan tanaman pangan yang selalu sama dari tahun 2025 hingga 2030.
- Program Sumsel mandiri benih harus dijalankan agar dapat mempermudah petani dalam memenuhi kebutuhan benih dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani

6. Dinas Perdagangan Prov. Sumsel

- Harus memperhatikan kualitas dan kuantitas beras yang diperdagangkan serta produk perdagangan lainnya sehingga tidak merugikan masyarakat.

7. Dinas Perindustrian Prov. Sumsel

- Dinas Perindustrian mengurusi usaha kecil menegah yaitu memantau dan membantu UMKM naik kelas
- Dinas Perindutrian tidak mempunyai potensi sumber pendapatan asli daerah.
- Program Dinas Perindustrian pada 5 tahun ke depan yaitu melatih para pelaku usaha, memberikan pengetahuan cara packaging, meningkatkan kualitas dari usaha yang ada dengan memberikan pelatihan ke Kab/Kota, membantu promosi baik di daerah, provinsi maupun luar negeri

8. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumsel

- Pagu anggaran untuk mendukung program 100.000 sultan muda sumsel masih minim
- Program 100.000 Sultan Muda Sumsel masuk ke dalam misi ke-5 dan merupakan salah satu dari 12 program unggulan Provinsi Sumatera Selatan. Program ini melibatkan beberapa OPD dan Kab/Kota sedangkan Diskop UKM menjadi koordinator. 100.000 sultan muda akan dicapai dalam waktu 5 tahun. Karena adanya keterbatasan anggaran, sehingga harus melibatkan beberapa stakeholder yang ada di Sumsel seperti OJK untuk keliling ke 17 kab/kota. Selain itu Diskop UKM juga melibatkan komunitas-komunitas yang tidak berbayar. Program ini dimulai sekitar bulan April dan sampai saat ini sudah ada 1500-an sultan muda
- Perlu ditinjau kembali keberlanjutan program nya, karena setelah tercetak 100.000 sultan muda, maka apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya

9. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel

- Perlu dukungan anggaran untuk BUFFALO CENTER karena ini merupakan nomor 3 di dunia dan dapat dijadikan salah sumber meningkatkan PAD Sumsel
- Harus memperhatikan kualitas dan kuantitas beras yang diperdagangkan

10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel

- Sumsel Wonderful, upaya-upaya untuk mendorong perekonomian yaitu dilaksanakanya FGD dengan berbagai stakeholder, telah dibukanya penerbangan internasional dari Palembang-Malaysia (PP).
- Terkait tugas pokok ekonomi kreatif dan kebudayaan, membentuk 1 UPTD untuk mengelola Monpera, taman budaya dan taman OPI sebagai penerimaan dari asset-aset daerah
- Ekonomi kreatif ada di 12 sub sektor namun beririsan dengan beberapa sektor lain seperti Koperasi UKM, sektor kuliner. Sehingga akan fokus pada sektor game dan animasi. Untuk tahun ini akan diadakam bimtek untuk game
- Pengembangan Destinasi wisata di Kab/Kota, melaksanakan event-event melalui berbagai asosiasi kepariwisataan seperti paket-paket wisata di Sumatera Selatan.
- Target jumlah wisatawan di Sumsel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar diinput dalam RPJMD.
- Lokus wisata yang dikembangkan di Taman Nasional Sembilang yaitu adanya burung migran. Untuk destinasi wisata bekerjasama
- Meningkatkan target wisatawan yang masuk di 2026 melalui event yang diadakan di sumsel. Jadi diadakan event-event apa yang bisa memacu perekonomian. Sehingga memberikan efek kepada industri yang lain

III. Kesimpulan :

1. Untuk semua OPD di bidang ekonomi harus memproyeksi pendapatan Tahun 2025-2023 untuk meningkatkan PAD 5 (lima) tahun ke depan serta fasilitas apa yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
2. OPD bidang ekonomi penyumbang restribusi harus menyesuaikan target untuk pendapatan restribusi 2025-2030 serta menelaah program/kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan.
3. OPD pengampu dan terlibat dalam mendukung program 100.000 Sultan Muda untuk membuat indikator yang konkrit dan normatif dari program tersebut.
4. Bab IV untuk disi secara lengkap serta dilihat target dan proyeksi 5 tahun ke depan (restribusi, hiliriisasi dll).
5. Anggaran-anggaran OPD sektor ekonomi diberikan porsi yang memadai disesuaikan dengan target yang ditetapkan.
6. RPJMD untuk proses perjalanan Sumsel 5 tahun ke depan dengan semangat optimis untuk mencapai target-target dengan semangat luar biasa serta harus menerapkan *reward* dan *punishment*. Untuk kepala OPD yang mampu mencapai target maka diberikan reward dan sebaliknya jika tidak dapat

mencapai target pemerintah daerah harus mengambil tindakan/sikap untuk menerapkan *punishment*.

7. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumsel Tahun 2030 adalah 8,1% maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah menjaga konsumsi, pengendalian inflasi, investasi tumbuh kisaran 10%, kawasan industri didukung, eksport sawit untuk disupport, kopi untuk disuport (peningkatan ekspor kopi), 5 fly over dan pelayanan optimal, hilirisasi harus disuport, meningkatkan jasa layanan public. Berdasarkan instruksi presiden setiap kota harus indah, cantik dan nyaman untuk meningkatkan pariwisata dengan focus Palembang, Pagar Alam dan OKU Selatan. Konstruksi perumahan selaras dengan arahan Presiden 3 jt rumah, teknologi digital (perlu support karena belum optimal), ekonomi hijau (bagaimana industri2 berbasis ekonomi hijau, contoh pabrik CPO di Banyuasin). PSN segera direalisasikan seperti Bendungan Tiga Dihaji, Jalan Tol dan Palembang New Port.
8. Membuat matrik 9 (Sembilan) Langkah konkrit meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumsel 8,1% Tahun 2030 serta apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan.

Demikian notulen ini disusun untuk menjadi laporan.

Notulis,

1. Dewi Susanti, S.Hut., M.Si .....
   NIP. 198302042001122001

2. Ernita Fauzia, S.Kom. .....
   NIP. 199009032022032005